



ESG

**RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN (RAKB)
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR Tri Darma Putri menyusun Standar Prosedur Operasional untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank guna mendukung program gerakan Perbankan Hijau (Green Banking).

BPR Tri Darma Putri menyambut baik kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya risiko kredit akibat tingginya tingkat gagal bayar (default) kredit yang disalurkan. Dengan kata lain, pembiayaan berkelanjutan secara langsung pada hakikatnya berkontribusi pada stabilitas keuangan BPR Tri Darma Putri secara jangka panjang.

BPR Tri Darma Putri sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPR sebagai lembaga perantara (intermediary institution) melalui dana yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pembiayaan, maka BPR Tri Darma Putri berkewajiban membiayai debitur secara selektif dengan menghindari diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan serta bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

BPR Tri Darma Putri berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial. Konkritnya BPR Tri Darma Putri berkeinginan menjalankan operasional dan bisnis Bank yang lebih bertanggung jawab dari aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Mengingat pentingnya Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi BPR Tri Darma Putri maka keberadaan Standar Pedoman Operasional Keuangan Berkelanjutan ini menjadi sangat relevan untuk menjadi acuan bagi seluruh insan BPR Tri Darma Putri dalam melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.



DAFTAR ISI

SAMPUL LAPORAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	4
1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	4
1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.4. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	6
1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan	8
1.6. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	8
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	10
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan	10
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	10
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	11
3.1. Rencana Strategis Bank	11
3.2. Kapasitas Organisasi	11
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	13
3.4. Strategi Komunikasi	14
3.5. Sistem Monitoring	14
3.6. Kebijakan Pemerintah	14
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	15
4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.	15
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	17
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	17
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	17
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	18
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan	18
5.5. Penutup	20



BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2024 merupakan tahun awal implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), secara efektif mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) yaitu dari Penyusunan SOP Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), pelaksanaan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan, Pembuatan Surat Keputusan Direksi tentang produk ramah lingkungan kepada nasabah, Mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan bantuan aplikasi digital untuk mengurangi cetak laporan, Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan dengan botol tumbler, serta Melakukan pelepasan burung dengan tujuan melestarikan lingkungan dan alam sekitar tetap terjaga dan bersih. Rencana tersebut sudah dapat terealisasi di tahun 2024.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2024 (Nominal Dalam Jutaan Rupiah)	
Produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana	353 Rekening	Rp1.765.000.000
b. Penyaluran Dana	455 Rekening	Rp2.275.000.000
Total Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp2.275.000.000	
b. Total Seluruh Kredit/Pembiayaan	Rp97.101.601.485	
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank	2,34%	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Nihil	Nihil
a. Energi terbarukan	Nihil	NPL Nihil
b. Efisiensi energi	Nihil	NPL Nihil
c. Pencegahan dan pengendalian polusi	Nihil	NPL Nihil
d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	Nihil	NPL Nihil
f. Transportasi ramah lingkungan	Nihil	NPL Nihil
g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
h. Adaptasi perubahan iklim	Nihil	NPL Nihil



i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Eco Efficient)	Nihil	NPL Nihil
j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional	Nihil	NPL Nihil
k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Nihil	NPL Nihil
l. Kegiatan UMKM	Nihil	NPL Nihil

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1.2.1. Visi

Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk mendorong pembangunan, mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan khususnya di kabupaten Klungkung dan di Bali pada Umumnya. Dalam mengemban misi ini, "PT BPR TRI DARMA PUTRI". Mengutamakan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan serta mengharapkan pinjaman dari penyandang dana lainnya, sehingga mampu memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan menengah secara individu atau kelompok. Menunjang tugas tersebut setiap Direksi, Staf dan Karyawan PT BPR "TRI DARMA PUTRI" di tuntut untuk memiliki sikap jujur, teliti, sanggup bekerja keras, takwa kepada Tuhan, dedikasi dan loyal terhadap perusahaan.

1.2.2. Misi

Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan :

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan.
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.

1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Sesuai POJK POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, Industri BPR (Bank Perekonomian Rakyat) pada pasal 2 ayat BPR sebagai Lembaga jasa Keuangan wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja sebagai bentuk dukungan terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan "3 (tiga) P" atau sering disebut dengan istilah triple bottom line yaitu Profit (Ekonomi); People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).
2. Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mengacu Pasal 4 (1) POJK 51, BPR wajib menyusun RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan). RAKB merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun). Program kerja ini sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi



untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut selaras dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

3. Selanjutnya, berdasarkan pasal Pasal 10 (1) POJK 51, BPR wajib menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainaibly Report). Laporan Keberlanjutan BPR ini memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup BPR dalam menjalankan bisnis berkelanjutan
4. Prosedur ini menggariskan fungsi, tugas dan tanggung jawab organisasi BPR yang terdiri atas Direksi, Bagian Bisnis, SDM, Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan / Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta Satuan Kerja Manajemen Risiko / Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dimaksud maka diperlukan Standar Pedoman Operasional Penerapan Keuangan Berkelanjutan BPR Tri Darma Putri.

1.4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.4.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
1	01 Nov 2024 s/d 30 Nov 2024	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
2	01 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025	Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan Memiliki Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang lebih lengkap	Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris	Pemahaman SDM akan Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan
3	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
4	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	Pelaksanaan edukasi internal guna Pengembangan SDM yang berkualitas	Peningkatan pemahaman terhadap SDM lebih berkualitas	Peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM agar lebih berkualitas
5	01 Nov 2025 s/d 30 Nov 2025	Kegiatan Sosial ke Panti Asuhan	Kegiatan sosial kepada anak yatim piatu sekaligus Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan sosial kepada anak yatim piatu



6	01 Nov 2025 s/d 30 Nov 2025	Melakukan pelepasan burung, benih ikan dan ikan dengan tujuan melestarikan, lingkungan dan alam sekitar tetap terjaga dan bersih	Melestarikan alam, lingkungan dan turun ikut serta menjaga ekosistem makhluk hidup yang kini semakin berkurang agar tetap terjaga	Diharapkan agar ekosistem alam tetap terjaga sampai dimasa yang akan datang dengan pelepasan burung ke alam bebas benih ikan serta ikan disungai diharapkan dapat berkembang biak.
---	-----------------------------	--	---	--

1.4.2. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Uraian dan Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2025	Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan Memiliki Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang lebih lengkap Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris	Pemahaman SDM akan Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan
2	2025	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
3	2025	Pelaksanaan edukasi internal guna Pengembangan SDM yang berkualitas Peningkatan pemahaman terhadap SDM lebih berkualitas	Peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM agar lebih berkualitas
4	2025	Kegiatan Sosial ke Panti Asuhan Kegiatan sosial kepada anak yatim piatu sekaligus Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan sosial kepada anak yatim piatu
5	2025	Melakukan pelepasan burung, benih ikan dan ikan dengan tujuan melestarikan, lingkungan dan alam sekitar tetap terjaga dan bersih Melestarikan alam, lingkungan dan turun ikut serta menjaga ekosistem makhluk hidup yang kini semakin berkurang agar tetap terjaga	Diharapkan agar ekosistem alam tetap terjaga sampai dimasa yang akan datang dengan pelepasan burung ke alam bebas benih ikan serta ikan disungai diharapkan dapat berkembang biak.
6	2026	Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan	Telah dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha yang ramah lingkungan dari segi sosial dan ekonomi masyarakat
7	2027	Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan	Terwujudnya penerapan Keuangan Berkelanjutan



		Terwujudnya penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan	
8	2028	Pembelajaran terhadap Debitur dan Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
9	2029	Penyusunan sistem pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan Diluncurkannya sistem pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan	Diluncurkannya sistem pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Bagian Penanggung Jawab aktivitas / program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Direksi menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan bagian terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Kepala Bagian Operasional mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan- kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
4. Kepala Bagian Dana dan Kepala Bagian Kredit dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/ jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).
5. Petugas Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
6. Audit Internal melakukan audit terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
7. Kepala Bagian Sumber daya Manusia dan Umum melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta mengkoordinir



melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

8. Seluruh karyawan ikut serta menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.



BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan PT BPR Tri Dharma Putri dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I di Indonesia 2015 – 2019. b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025. c. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. d. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Laporan RAKB ini disusun oleh internal BPR yaitu Direksi yang didukung oleh Unit Kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan RAKB oleh Direksi
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Bagian SDM dan Umum
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Bagian Kredit, Bagian Dana, Petugas IT, Bagian SDM & Umum, Bagian Kepatuhan, Audit Internal dan Bagian Operasional.
4. Langkah strategis khususnya terkait penentuan prioritas program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek dan jangka panjang diarahkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan Komisaris.



BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR Tri Darma Putri akan terus mengembangkan dan menyediakan produk- produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali pada umumnya dan Klungkung pada khususnya dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM dan juga pembiayaan kredit kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama. BPR Tri Darma Putri juga akan meningkatkan portolio kredit untuk membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR Tri Darma Putri akan melaksanakan pelatihan- pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari. Sesuai dengan visi BPR Tri Darma Putri yaitu mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup orang banyak, dengan menggunakan prinsip kehati- hatian serta pelayanan kepada konsumen bank sebagai fungsi intermediasi dalam menghimpun dana dan penyaluran kredit mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR Tri Darma Putri akan melakukan penetrasi pasar ke wilayah pemasaran baru di pasar pasar Klungkung.
2. Pembuatan promosi audio maupun video melalui media sosial.
3. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra BPR lainnya.
4. Mengoptimalkan penyaluran kredit.
5. Merperbaiki kualitas kredit dengan mengintensifkan penagihan terhadap debitur NPL.
6. Meningkatkan DPK melalui pelayanan prima dan retensi terhadap nasabah loyal.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang bisnis dan operasional.
8. Mendayagunakan sumber daya untuk menjaga rasio BOPO agar lebih efisien.
9. peningkatan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
10. Menjaga ketersediaan likuiditas.

3.2. Kapasitas Organisasi

3.2.1. Kapasitas Organisasi

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing PT BPR Tri Darma Putri juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	I Made Wardana, A.Md., Ak	Komisaris Utama
2	Drs. I Wayan Bagiastra	Komisaris



Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Suandi Adnyana, S.E	Direktur Utama
2	Ni Luh Sri Arniti, S.E	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Ni Kadek Astini	PE Audit Intern
2	Ni Ketut Sukarti	PE Kepatuhan, MR dan APU PPT & PPPSPM
3	Ni Kadek Dwi Krisna Utami	Kepala Bagian SDM dan Umum
4	Ni Made Sudiantini	Kepala Bagian Dana
5	Anak Agung Gde Bayu Widura	Kepala Bagian Kredit
6	I Putu Merta	Kepala Kas
7	Anak Agung Istri Dewi Sukmawati	Kepala Bagian Operasional

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing- masing. Komposisi SDM di BPR Tridarma Putri juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Karyawan

**Jumlah Komposisi Pegawai Bank
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	1
3	Sarjana (S1)	37
4	Sarjana Muda / Diploma	2
5	SMA Atau Sederajat	21
6	SMP Sederajat	0
7	SD Sederajat	0
Total		61



**Jumlah Komposisi Karyawan
Berdasarkan Gender**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	33
Total		61

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Bank sesuai pada tabel di bawah ini:

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	2024 (TW III)	2023	2022
1	Total Aset	Rp177.783.118 .440	Rp157.818.018. 229	Rp124.790.153. 315
2	Modal Inti	Rp11.201.416. 254	Rp10.109.802.9 02	Rp9.720.106.58 4
3	Kredit Yang Diberikan	Rp98.365.412. 833	Rp88.151.969.0 19	Rp78.317.258.0 09
4	Dana Pihak Ketiga	Rp157.854.674 .366	Rp143.139.529. 007	Rp108.786.373. 506
5	Pendapatan Operasional	Rp15.743.961. 276	Rp16.600.927.6 56	Rp13.623.648.5 58
6	Beban Operasional	Rp13.579.124. 795	Rp14.651.296.1 45	Rp12.014.055.2 24
7	Laba Operasional	Rp2.164.836.4 81	Rp1.949.631.51 1	Rp1.609.593.33 4

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2024 (TW III)	2023	2022
1	Rasio KPMM	13,42%	13,61%	15,17%
2	NPL Gross	5,77%	8,23%	6,69%
3	NPL Net	3,11%	6,19%	5,15%
4	ROA	1,51%	1,36%	1,42%
5	NIM	7,81%	7,16%	6,65%
6	Rasio BOPO	86,25%	88,34%	90,07%
7	LDR	61,24%	61,58%	65,75%

3.3.2. Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi / software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi



untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

3.4 Strategi Komunikasi

PT. BPR Tri Dharma Putri berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, PT. BPR Tri Dharma Putri terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

3.5 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja seluruh unit kerja.

3.6 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.



BAB IV

PRIORITAS DAN URAIAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

a. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan prosedur operasional.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan Memiliki Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang lebih lengkap	01 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan
2	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	01 Mar 2025 s/ d 31 Mar 2025	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/ praktisi dalam implementasinya



d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.



BAB V

TINDAK LANJUT

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait dalam hal ini sangat penting.
4. Fungsi Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
5. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
6. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektifitas realisasi Rencana Keuangan berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain

1. Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan tahun berjalan
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Triwulanan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Pada waktu yang sama dengan penyampaian Rencana Bisnis	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB



3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir Mei Tahun berikutnya	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
---	-----------------------	--	---

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Terus berusaha memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh BPR
2. Terus mensosialisasikan aksi keuangan berkelanjutan sebagai komitmen BPR menjalankan instruksi dari pemerintah
1. Pelaksanaan dan sosialisasi aksi keuangan berkelanjutan pada tahun berjalan.
2. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, PT. BPR Tri Darma Putri melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi risiko.

- a. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.
 1. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
 2. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.



- c. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
1. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka PT. BPR Tri Darma Putri akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 3. PT. BPR Tri Darma Putri memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, PT. BPR Tri Darma Putri akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
 4. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi PT. BPR Tri Darma Putri dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
 5. PT. BPR Tri Darma Putri akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.
- d. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.
1. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 2. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
 3. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
 4. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 5. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan



lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

- e. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/membatasi/mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
- f. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.
 - 1. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
 - 2. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
 - 3. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT BPR Tri Darma Putri ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.



PT BPR Tri Darma Putri
Jl. Diponegoro no 25 Semarang
Telepon: 0366 21203

Website: <https://www.bprtridarmaputri.co.id/>, Email: bpr_tridarmaputri@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB (RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan RAKB Tahun 2025
PT BPR Tri Darma Putri**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Semarang, 02 Desember 2024

PT BPR Tri Darma Putri

Disusun oleh,



I Wayan Suandi Adnyana, S.E.
Direktur Utama

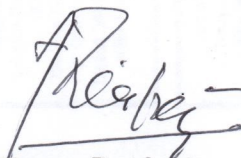


Ni Luh Sri Arniti, S.E.
Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

Disetujui oleh,



I Made Wardana, Amd., Ak
Komisaris Utama



Drs. I Wayan Bagiastra
Komisaris